

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan pada tanggal 16 November 2012 lahir karena didasarkan pada negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal.

Melalui Undang-Undang ini, setiap warga negara perlu memahami apa yang dimaksudkan dengan “Ketahanan Pangan”, yaitu kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Sedangkan “Keamanan Pangan”, yaitu kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.

Arah kebijakan umum pembangunan ketahanan pangan adalah untuk (1) meningkatkan ketersediaan dan penanganan

kerawanan pangan (2) meningkatkan sistem distribusi dan stabilisasi harga pangan (3) meningkatkan pemenuhan kebutuhan konsumsi dan keamanan pangan sampai kerumah tangga.

Dalam rangka meningkatkan ketersediaan dan menangani kerawanan pangan, kebijakan ketahanan pangan diarahkan untuk (a) meningkatkan dan menjamin kelangsungan produksi pangan didalam negeri menuju kemandirian pangan (b) mengembangkan kemampuan pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat secara sinergis dan partisipatif (c) mencegah dan menanggulangi kondisi rawan pangan secara dinamis.

Dalam aspek peningkatan sistem distribusi dan stabilisasi harga pangan, kebijakan ketahanan pangan diarahkan untuk (a) mengembangkan sistem distribusi yang efektif dan efisien untuk menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan (b) mengembangkan koordinasi sinergis lintas sektor dalam pengelolaan distribusi, harga dan akses pangan (c) meningkatkan peran serta kelembagaan masyarakat dalam kelancaran distribusi, kestabilan harga dan akses pangan.

Dalam hal peningkatan pemenuhan kebutuhan konsumsi dan keamanan pangan, kebijakan ketahanan pangan diarahkan untuk (a) mempercepat penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis pangan lokal (b) mengembangkan teknologi pengolahan pangan terutama pangan lokal non beras dan terigu guna meningkatkan nilai tambah dan nilai sosial (c) mengembangkan keamanan pangan segar didaerah sentra produksi pangan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
- h. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005 – 2025; dan
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kinerja Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 ini adalah untuk mendokumentasikan perencanaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan, yang berisikan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan dengan dukungan pembiayaan bersumber Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten Pesisir

Selatan, dengan harapan agar dapat mengakselerasi secara optimal segala partisipasi aktif masyarakat pada berbagai aktivitas produktif pada bidang pangan.

Rencana Kinerja Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 ini disusun dengan tujuan :

1. Menjadikannya sebagai wadah aspirasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan yang disampaikan secara partisipatif dalam berbagai forum yang sesuai dengan konstitusi;
2. Merumuskan gambaran umum langkah operasional Dinas pangan Kabupaten Pesisir Selatan melalui program dan kegiatan bidang pangan;
3. Menjadikannya sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran (TA) 2018;
4. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang menjadi tolok ukur penilaian capaian kinerja Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan; dan
5. Mewujudkan konsistensi atas sinkronisasi perencanaan tahunan Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Renstra dan hasil Musrenbang RKPD dalam mengaplikasikan tugas pokok dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan Rencana Kinerja Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II Hasil Evaluasi Rencana Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2017

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat

2.2. Daerah

2.3. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan

2.4. Fungsi Perangkat Daerah

2.5. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Penelaahan Usulan Program dan kegiatan Masyarakat

BAB III Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI KINERJA TAHUN 2017

2.1. Evaluasi Kinerja Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017

Pengukuran kinerja dituangkan dalam formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS). Indikator yang digunakan dalam pengukuran kinerja kegiatan adalah masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome).

Pengukuran Kinerja Kegiatan didasarkan pada target kinerja yang disusun pada awal tahun anggaran. Adapun target kinerja pada masing-masing program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian / Perkebunan)
 - a. Penanganan Daerah Rawan Pangan
 - Masukan
Jumlah dana yang dibutuhkan : Rp 58.258.670,00
 - Keluaran
Terlaksananya Penanganan Daerah Rawan Pangan
 - Hasil
Penanganan rawan pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat.
 - b. Pengembangan Desa Mandiri Pangan
 - Masukan
Jumlah dana yang dibutuhkan : Rp 87.415.460,00
 - Keluaran
Terlaksananya Pengembangan Desa Mandiri Pangan

- Hasil

Terlaksananya pemberdayaan kelompok desa mandiri pangan dan pemberdayaan masyarakat miskin/rawan pangan.

c. Penguatan Kelembagaan Cadangan Pangan Masyarakat

- Masukan

Jumlah dana yang dibutuhkan : Rp 57.163.100,00

- Keluaran

Terlaksananya pembinaan dan pengisian lumbung pangan masyarakat.

- Hasil

Meningkatnya cadangan pangan masyarakat.

d. Panel dan Pemantauan Harga Pangan Pokok

- Masukan

Jumlah dana yang dibutuhkan : Rp 43.465.200,00

- Keluaran

Terlaksananya pemantauan harga pangan di setiap Kecamatan.

- Hasil

Tersedianya informasi harga pangan tiap minggu di setiap kecamatan.

e. Pemantauan Jaringan Distribusi Pangan (Pasokan Pangan, Akses Pangan, Harga Pangan dan HBKN)

- Masukan

Jumlah dana yang dibutuhkan : Rp 46.976.000,00

- Keluaran

Terlaksananya pemantauan produksi pangan, jaringan distribusi, pasokan pangan dan HBKN

- Hasil
Tersedianya informasi produksi pangan, jaringan distribusi, pasokan pangan dan HBKN.
- f. Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten
 - Masukan
Jumlah dana yang dibutuhkan Rp 86.615.350,00
 - Keluaran
Tersedianya cadangan pangan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
 - Hasil
Meningkatkan cadangan pangan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
- g. Penyusunan Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan (FSVA)
 - Masukan
Jumlah dana yang dibutuhkan Rp 31.936.920,00
 - Keluaran
Tersedianya pemetaan ketahanan pangan dan kerentanan pangan
 - Hasil
Tersedianya dokumen analisis ketahanan dan kerentanan pangan
- h. Pengembangan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM)
 - Masukan
Jumlah dana yang dibutuhkan Rp 38.076.460,00
 - Keluaran

Terlaksananya pembinaan dan pengembangan lembaga distribusi pangan masyarakat.

- Hasil

Stabilnya harga pangan pokok (gabah dan beras) di tingkat Produsen dan Konsumen.

i. Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat/TTI

- Masukan

Jumlah dana yang dibutuhkan Rp 31.077.350,00

- Keluaran

Pengembangan usaha pangan masyarakat dalam peningkatan ketersediaan dan pengendalian harga.

- Hasil

Stabilnya harga pangan pokok di tingkat produsen dan konsumen

j. Analisis Ketersediaan Pangan berdasarkan Analisa Bahan Makanan (NBM)

- Masukan

Jumlah dana yang dibutuhkan Rp 58.747.910,00

- Keluaran

Terlaksananya penyusunan dan analisis ketersediaan pangan berdasarkan Analisa Neraca Bahan Makanan (NBM)

- Hasil

Tersedianya dokumen analisis ketersediaan pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017

k. Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)

- Masukan

Jumlah dana yang dibutuhkan Rp 31.317.710,00

- Keluaran

Terlaksananya penyusunan dan analisis ketersediaan pangan berdasarkan Analisa Neraca Bahan Makanan (NBM).

- Hasil

Tersedianya dokumen analisis ketersediaan pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017.

2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

a. Peningkatan dan Pengembangan Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan

- Masukan

Jumlah dana yang dibutuhkan adalah Rp
248.969.660,00

- Keluaran

Terlaksananya promosi Bidang Ketahanan Pangan.

- Hasil

Menurunnya tingkat ketergantungan masyarakat terhadap konsumsi bahan pangan tertentu (beras).

b. Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan

- Masukan

Jumlah dana yang dibutuhkan adalah Rp
54.632.760,00

- Keluaran

Terlaksananya pembinaan Kelembagaan Wanita dalam optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan.

- Hasil

Meningkatnya pemanfaatan pekarangan Lahan
Pekarangan sebagai.

- c. Peningkatan Penanganan Keamanan Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen
 - Masukan
Jumlah dana yang dibutuhkan adalah Rp 82.354.740,00
 - Keluaran
Terlaksananya sosialisasi keamanan pangan
 - Hasil
Meningkatnya bahan pangan yang aman dikonsumsi masyarakat.
- d. Penyusunan Pola Pangan Harapan
 - Masukan
Jumlah dana yang dibutuhkan adalah Rp 38.668.359,00
 - Keluaran
Terlaksananya penyusunan analisis pola pangan harapan.
 - Hasil
Tersedianya dokumen analisis pola konsumsi pangan harapan
- e. Perumusan Kebijakan Ketahanan Pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan
 - Masukan
Jumlah dana yang dibutuhkan adalah Rp 102.106.230,00
 - Keluaran
Terlaksananya tugas dan fungsi Dewan Ketahanan Pangan
 - Hasil

Tersedianya rumusan Kebijakan mewujudkan ketahanan pangan Kabupaten Pesisir Selatan.

- f. Pekan Nasional Kelompok Tani (Penas Tani)
 - Masukan
Jumlah dana yang dibutuhkan adalah Rp 71.059.000,00
 - Keluaran
Terlaksananya Penas Tani
 - Hasil
Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan dalam mewujudkan ketahanan pangan.
- g. Teknologi Pengolahan Pangan Lokal
 - Masukan
Jumlah dana yang dibutuhkan adalah Rp 42.757.820,00
 - Keluaran
Terlaksananya pelatihan bagi pengusaha pangan lokal
 - Hasil
Berkembangnya olahan pangan lokal mendukung pariwisata daerah.
- h. Model Percontohan Keamanan Pangan
 - Masukan
Jumlah dana yang dibutuhkan adalah Rp 42.106.760,00
 - Keluaran
Terbentuknya nagari aman pangan
 - Hasil
Meningkatnya bahan pangan yang aman dikonsumsi masyarakat
- i. Gerakan Konsumsi B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman)
 - Masukan

Jumlah dana yang dibutuhkan adalah Rp
329.291.370,00

- Keluaran
Terlaksananya gerakan konsumsi dan lomba cipta menu B2SA
- Hasil
Menurunnya tingkat ketergantungan masyarakat terhadap bahan pangan tertentu (beras)

j. Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan

- Masukan
Jumlah dana yang dibutuhkan adalah
Rp127.034.280,00
- Keluaran
Terlaksananya pengawasan keamanan dan mutu pangan
- Hasil
Meningkatnya pangan yang aman dikonsumsi masyarakat.

k. Penyusunan Master Plan Ketahanan Pangan Masyarakat

- Masukan
Jumlah dana yang dibutuhkan adalah Rp135.287.030
- Keluaran
Terlaksananya penyusunan Master Plan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangan Kabupaten Pesisir Selatan
- Hasil
Tersedianya Dokumen Master Plan Ketahanan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan

l. Penyusunan Naskah Akademis Ketahanan Pangan

- Masukan

Jumlah dana yang dibutuhkan : Rp9.817.920,00

- Keluaran
Terlaksananya Penyusunan awal naskah akademis
- Hasil
Tersusunnya naskah akademis

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pangan

Sesuai dengan pembentukan Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas Pangan terbentuk pada akhir tahun 2016 maka program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pangan sampai tahun 2017 secara umum masih melanjutkan beberapa program yang telah dilaksanakan pada Tahun 2016.

Evaluasi terhadap kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan ketersediaan pangan

- Penanganan Daerah Rawan Pangan dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi anggaran 96,40 %

Kegiatan yang dilakukan dalam menangani daerah rawan pangan adalah dengan pemberian bantuan gizi buruk untuk 11 kepala keluarga, 8 Kepala Keluarga menerima bantuan teknak ayam, sedangkan 3 kepala keluarga menerima bantuan itik.

- Pengembangan Desa Mandiri Pangan dengan capaian kinerja 100 % dengan realisasi anggaran 91,83 %.

Pada tahun 2017, selain dilakukan pembinaan pada 14 Desa Mandiri Pangan, juga dilakukan pembinaan terhadap 2 nagari mandiri pangan yaitu Taratak Sutura dan Sungai Tunu Utara. Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan merupakan penunjang kegiatan dana dekonsentrasi Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Republik

Indonesia. Dalam pelaksanaan kegiatan ini walaupun masih belum berjalan baik, tetapi sudah ada perubahan ditingkat kelompok aktifitas yang ditandai dengan adanya kegiatan usaha kelompok pada komoditi-komoditi tertentu yang mulai menampilkan hasil.

- Kegiatan Penguatan Kelembagaan Cadangan Pangan Masyarakat dengan capaian kinerja 100 % dengan realisasi anggaran 95,66 %.

Kegiatan Pembinaan Lumbung Pangan Masyarakat sampai tahun 2017 telah dilakukan pembinaan sebanyak 23 unit lumbung pangan Masyarakat di 13 kecamatan dalam Kabupaten Pesisir Selatan. Dengan dilakukan pembinaan secara terus menerus maka diharapkan Lumbung Pangan dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

- Kegiatan Panel dan Pemantauan Harga pangan Pokok
Panel dan pemantauan harga pangan pokok dilaksanakan pada 15 kecamatan guna mengetahui kondisi harga pangan tingkat Kecamatan hingga Kabupaten. Kegiatan ini berfungsi untuk menganalisa bagaimana gejolak harga yang terjadi di tingkat kecamatan dan kabupaten, Dengan adanya analisa ini diharapkan dapat menekan gejolak harga di tingkat masyarakat.
- Kegiatan Pemantauan Produksi Pangan, Jaringan Distribusi, Pasokan Pangan dan HBKN dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi anggaran 96,51%.

Kegiatan ini bertujuan untuk memantau produksi pangan, jaringan distribusi serta pasokan pangan di tingkat kecamatan. Selain itu juga dilakukan pemantauan pada

Hari Besar Keagamaan Nasional yang berfungsi menekan gejolak harga.

- Kegiatan Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah dengan capaian kinerja 100 % dengan realisasi anggaran 97,89 %
Pada akhir Tahun 2016, jumlah cadangan pangan pemerintah yang berada di Bulog sebanyak 44,5 ton. Pada awal tahun 2017, terjadi bencana banjir di beberapa daerah sehingga beras cadangan pangan disalurkan untuk daerah rawan pangan sebanyak 10 ton. Pada Tahun 2017 pengadaan beras cadangan pangan pemerintah sebanyak 6 ton sehingga total beras cadangan pangan sampai saat ini adalah sebanyak 40,5 ton. Cadangan pangan merupakan suatu kebutuhan yang diperlukan untuk menjaga stabilitas pasokan pangan agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pangannya setiap saat. Pasokan yang stabil dari waktu ke waktu dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, sebaiknya dilakukan secara mandiri, serta sesuai dengan kemampuan masyarakat itu sendiri, terutama untuk mengatasi kekurangan pangan, kelebihan pangan, dan/atau ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan, yang mengakibatkan terjadinya rawan pangan.
- Kegiatan Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan (FSVA) dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi anggaran 89,93%. Kegiatan FSVA bertujuan untuk mengetahui pemetaan daerah tahan pangan dan rentan pangan. Berdasarkan peta ini dapat menentukan daerah mana yang akan dijadikan prioritas pelaksanaan program dan kegiatan.

- Kegiatan Penguatan Kelembagaan Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) dengan capaian kinerja 100 % dengan realisasi anggaran 95,99 %

Kegiatan ini berupa pemberdayaan 5 Gapoktan yang mendapatkan alokasi Dana Bantuan Sosial sebesar Rp. 225.000.000,- dari Kegiatan Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia dalam bentuk dana Dekosentrasi. Kegiatan Gapoktan sebagai lembaga distribusi pangan yaitu pembelian, penjualan, penyimpanan dan pengolahan gabah dan beras. Lembaga distribusi pangan masyarakat juga berperan dalam stabilitas harga pangan saat musim paceklik maupun panen raya. Saat musim paceklik lembaga ini harus dapat menyediakan dan mendistribusi pangan ditingkat masyarakat dan ke pasar-pasar dan menampung hasil panen masyarakat saat panen dengan harga yang wajar dan Gapoktan pelaksana kegiatan ini dengan mitranya dapat bersaing dengan pedagang luar Kabupaten Pesisir Selatan juga berfungsi mempromosikan kualitas beras keluar Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

- Kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat/TTI dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi 95,14%

Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat/Toko Tani Indonesia (TTI) dibentuk dalam rangka menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pokok strategis, rantai distribusi pemasaran yang terintegrasi agar lebih efisien, harga konsumen dapat ditransmisikan dengan baik kepada harga petani (produsen).

- Kegiatan Analisis Ketersediaan Pangan Berdasarkan Analisa Neraca Bahan Makanan dengan capaian kinerja 100 % dengan realisasi anggaran 93,57 %.

Analisis Neraca Bahan Makanan menginformasikan kondisi ketersediaan bahan pangan dan jumlah kebutuhan untuk dikonsumsi penduduk dalam tingkat ketersediaan energi dan protein dengan perbandingan dari hasil rekomendasi WNPG VIII tahun 2012 dimana tingkat ketersediaan energi perorang minimal 2400 Kkal dan 63 gr protein.

2. Meningkatkan penganekaragaman konsumsi pangan.

- Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Promosi Percepatan Konsumsi Pangan dengan capaian kinerja 100 % dengan realisasi anggaran 94,24 %. Promosi dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitunya Festival langkisau, Hari Pangan Sedunia Tingkat Propinsi di Kota Sawahlunto dan Gelar Pangan Nusantara di Pontianak.

- Kegiatan Peningkatan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dengan capaian kinerja 100 % dengan realisasi anggaran 91,94 %.

Kegiatan ini merupakan penunjang/pendampingan kegiatan yang didanai oleh APBN. Pembinaan dilakukan KWT yang tersebar di 15 Kecamatan.

- Kegiatan Percepatan Penanganan Keamanan Konsumsi Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen dengan capaian kinerja 100 % dengan realisasi anggaran 94,96 %.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kewanamanan pangan di kabupaten Pesisir Selatan, untuk tahun 2017 ini Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan telah membentuk tim Koordinasi dan Tim Tekhnis Keamanan pangan,

berdasarkan hasil kegiatan 2017, masih perlu dilakukan peningkatan jumlah kegiatan keamanan pangan di Kabupaten Pesisir Selatan kedepan. Dari hasil kegiatan ini didapatkan kelompok yang telah diberi perlakuan keamanan pangan yaitu sampel pangan segar, sampel jajanan anak sekolah, jajanan porsi, keamanan ikan dan makanan kadaluarsa. Ternyata bagi kelompok yang telah terpilih jadi sampel awal uji didapatkan ada masalah ketidak amanan pangan dan dalam jangka waktu tertentu setelah dilakukan sosialisasi terdapat perubahan perilaku yang positif.

- Kegiatan Penyusunan Pola Pangan Harapan dengan capaian kinerja 100 % dengan realisasi anggaran 98,67 %.

Penyusunan Skor Pola Pangan Harapan merupakan kegiatan yang menjadi dasar dalam penetapan perencanaan kegiatan peningkatan status gizi masyarakat yang dicerminkan dengan nilai skor PPH, untuk tahun 2017 skor PPH berdasarkan data Susenas yang di adjustifikasi didapatkan skor sebesar 76,5%, untuk meningkat skor PPH perlu berbagai usaha seperti Optimalisasi pemanfaatan pekarangan, lomba B2SA, sosialisasi tentang pemanfaatan pangan lokal sebagai sumber pangan keluarga.

- Kegiatan Perumusan Kebijakan Ketahanan Pangan Melalui Dewan Ketahanan Pangan dengan capaian kinerja 100% dan realisasi anggaran 94,44%.

Dalam rapat koordinasi Dewan Ketahanan Pangan tahun 2017 yang diangkat menjadi tema pembahasan adalah Sinergitas Program Dalam Rangka Pengembangan Nagari Mandiri Pangan Di Kabupaten Pesisir Selatan. Yang

melatarbelakangi pengambilan tema ini adalah berdasarkan peta FSVA pada daerah Sumatera Barat masih terdapat 176 Nagari yang rentan pangan dan gizi sehingga perlu perhatian seluruh pihak terkait untuk bersama-sama mengarahkan program dan kegiatan sehingga nagari rentan pangan diharapkan dapat menjadi nagari mandiri pangan.

- Pekan Nasional Kelompok Tani (Penas Tani) dengan capaian kinerja 100% dan realisasi anggaran 100%

Pekan Nasional Kelompok tani dilaksanakan di Provinsi Daerah Istimewa Nanggroe Aceh.

- Model Percontohan Keamanan Pangan dengan capaian kinerja 100% dan realisasi anggaran 89,57%

Tujuan utama dari kegiatan ini adalah terbentuknya nagari aman pangan yang akan dijadikan model percontohan bagaimana sebuah nagari dikatakan aman pangan.

- Gerakan Konsumsi B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman) dengan capaian kinerja 100% dan realisasi anggaran 92,56%. Kegiatan yang dilakukan antara lain lomba cipta menu B2SA tingkat Propinsi dan Nasional serta sosialisasi menu B2SA sebanyak 1 kali.

- Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan dengan capaian kinerja 100% dan realisasi anggaran 96,36%. Kegiatan yang dilakukan adalah pengambilan sampel untuk pangan segar, jajanan anak sekolah dan pangan hewani (daging dan ikan) untuk 15 Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan keamanan pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat.

- Penyusunan Master Plan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan capaian kinerja 100% dan realisasi anggaran

99,77%. Penyusunan masterplan dilaksanakan secara swakelola bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Andalas. Tujuan dari kegiatan ini adalah tersedianya dokumen masterplan ketahanan pangan masyarakat yang berisikan program pembangunan dalam berbagai kegiatan yang meliputi pembangunan fisik, sumber daya manusia, sumber daya ekonomi pada kawasan pertanian di Kabupaten Pesisir Selatan.

Capaian kinerja keuangan dalam rangka realisasi pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian indikator kinerja pembangunan ketahanan pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 yaitu dengan alokasi anggaran Rp 1.855.136.059,00.- dan terealisasi Rp 1.763.410.542,00,- atau tingkat penyerapannya yaitu 95,79%, dengan rincian sebagaimana pada Tabel 3. dibawah ini :

Tabel 3
Capaian Keuangan Sasaran

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIA N (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatkan ketersediaan pangan	1. Tingkat Ketersediaan pangan Utama (kg/kapita/ tahun)	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)	571.050.130,00	542.708.449,00	95,04%
		Kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan	87.415.460,00	80.271.360,00	91,83%
		Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan	87.415.460,00	80.271.360,00	91,83%

		Kegiatan Penguatan Kelembagaan Cadangan Pangan Masyarakat	57.163.100,00	54.679.850,00	95,66%
		Kegiatan Panel dan Pemantauan Harga Pangan Pokok	43.465.200,00	43.072.650,00	99,10%
		Kegiatan Pemantauan Produksi pangan, jaringan Distribusi, Pasokan Pangan dan HBKN	46.976.000,00	45.334.790,00	96,51%
		Kegiatan Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten	86.615.350,00	84.791.480,00	97,89%
		Kegiatan Penyusunan Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan pangan (FSVA	31.936.920,00	28.722.100,00	89,93%
		Kegiatan Pengembangan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM)	38.076.460,00	36.549.200,00	95,99%
		Kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat/ TTI	31.077.350,00	29.568.139,00	95,14%
		Kegiatan Analisis Ketersediaan pangan berdasarkan Analisa Neraca Bahan Makanan	58.747.910,00	54.969.850,00	93,57%
		Kegiatan Pengembangan Sistem Kewaspadaan dan Gizi (SKPG)	31.317.710,00	28.590.110,00	91,29%
Jumlah			571.050.130,00	542.708.449,00	95,04%

2. Meningkatkan penganeekaragaman konsumsi pangan	1. Tingkat konsumsi pangan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat			
	- Tingkat Konsumsi Energi (kkal/kapita/hari)	Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Promosi Penganeekaragaman Konsumsi Pangan	248.969.660,00	234.638.627,00	94,24%
	- Tingkat Konsumsi Protein (gram/kapita/hari)				
		Kegiatan Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan	54.632.760,00	50.226.800,00	91,94%
		Kegiatan Penyusunan Pola Pangan Harapan	38.668.359,00	38.154.242,00	98,67%
		Kegiatan Perumusan Kebijakan Ketahanan Pangan Melalui Dewan Ketahanan Pangan	102.106.230,00	96.433.241,00	94,44%
		Kegiatan Pekan Nasional Kelompok (Penas Tani)	71.059.000,00	71.059.000,00	100%
		Kegiatan Teknologi Pengolahan Pangan Lokal	42.757.820,00	42.315.740,00	98,97%
		Kegiatan Model Percontohan Keamanan Pangan	42.106.760,00	37.715.920,00	89,57 %
		Kegiatan Gerakan Konsumsi B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman)	329.291.370,00	304.801.353,00	92,56%
		Kegiatan Pengawasan Keamanan dan Mutu pangan	135.287.030,00	134.980.100,00	99,77%

		Kegiatan Penyusunan Master Plan Ketahanan pangan Masyarakat	135.287.030,00	134.980.100,00	99,77%
		Penyusunan Naskah Akademis Ketahanan Pangan	9.817.920,00	9.767.920,00	99,49%
JUMLAH			1.284.085.929,00	1.220.702.093,00	95,06%
JUMLAH TOTAL			1.855.136.059,00	1.763.410.542,00	95,06%

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Adapun beberapa isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas pangan adalah sebagai berikut:

1. Masih banyak ditemukan pemakaian residu, zat aditif dan zat berbahaya lainnya pada pangan segar, pangan olahan dan jajanan anak sekolah.
2. Tingginya fluktuasi harga pangan yang dibutuhkan masyarakat pada waktu tertentu.
3. Masih tingginya ketergantungan masyarakat pada pangan pokok beras.
4. Masih banyak wilayah rawan pangan/penduduk miskin.
5. Belum optimalnya pengelolaan cadangan pangan pemerintah kabupaten, pemerintahan nagari dan kelembagaan cadangan pangan masyarakat.
6. Masih rendahnya pengetahuan, sikap dan keterampilan SDM pelaku utama dan pelaku usaha.
7. Belum optimalnya kerjasama sinergis diantara SKPD terkait dalam mendukung Ketahanan Pangan di Kabupaten Pesisir Selatan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan kerangka pendahuluan pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah yang berhasil dihimpun dari masyarakat, stakeholders dan pemerintah sendiri. Rancangan awal menginformasikan rancangan kerangka ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, arah prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja program dan kegiatan yang dilengkapi dengan rancangan pagu indikatif untuk setiap Perangkat Daerah untuk tahun yang direncanakan sebagai acuan bagi setiap Perangkat Daerah dalam menyiapkan rancangan Renja Perangkat Daerah. Rancangan awal RKPD berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan indikatif untuk tahun direncanakan dan tahun yang akan datang. Berdasarkan rancangan awal Dinas Pangan serta berdasarkan hasil analisis kebutuhan diketahui bahwa kegiatan pada tahun 2017 sesuai dengan evaluasi rancangan awal RKPD.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan awal RKPD disusun melalui 2 tahapan, yaitu proses inventarisir indikator Renja Perangkat Daerah, berupa sub-sub kegiatan yang bersifat *top down* berasal dari himpunan kebutuhan program kegiatan dan *bottom up* melalui musrenbang. Selanjutnya berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target tingkat kinerja yang dicapai oleh Perangkat Daerah, dan hasil evaluasi kegiatan yang ada dengan melihat isu strategis, tantangan dan hambatan. Untuk memfasilitasi kebutuhan tersebut diakomodasi dalam Urusan Wajib Ketahanan Pangan.

Sebagai upaya capaian indikator kinerja, maka program dan kegiatan yang menjadi prioritas pada tahun 2017 diantaranya adalah:

- a. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sikap wanita tani dan anggota dalam mengkonsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman.
- b. Tersedianya peta kerawanan pangan sebagai data base Kabupaten Pesisir Selatan.
- c. Tersosialisasi keamanan pangan segar mutu bagi aparatur.
- d. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para pengurus lumbung pangan masyarakat tentang cara pengelolaan lumbung masyarakat.
- e. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta dan pengurus lembaga keuangan desa melalui pelatihan administrasi pembukuan kelompok desa mandiri pangan.
- f. Meningkatkan pengelolaan dan keterampilan kelompok dalam pelatihan pengolahan pangan.
- g. Meningkatkan peran dan fungsi Dewan Ketahanan Pangan dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan untuk mewujudkan sinergitas pembangunan berbagai sektor terkait.

BAB III

PENUTUP

Perencanaan kinerja adalah proses penyusunan rencana kinerja (Renja) sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra (perencanaan lima tahun), yang akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pangan tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018 di lingkup Dinas Pangan, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2018 yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahun 2018.

Semoga RKT Dinas Pangan tahun 2018 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2018. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Painan, 10 Januari 2018
Plt. KEPALA DINAS PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

ALFIS BASYIR, S.E., M.Hum.
NIP. 19700731 199403 1 004

LAMPIRAN

Usulan Rencana Kerja Tahun 2019
Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan